

SKRIPSI

**ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DI SEKTOR
PENDIDIKAN DAN SEKTOR KESEHATAN TERHADAP INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
DI KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2008-2017**

*"Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Pada Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Riau"*

ROSALINA MARDIYANI

NPM. 155110997

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2018



FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Alamat: JL. Kaharuddin Nasution No 113 Perhentian Marpyan
Telp. (0761) 674681 Fax. (0761) 674834 Pekanbaru – 28284

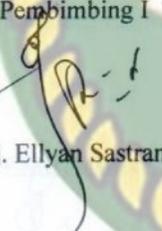
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

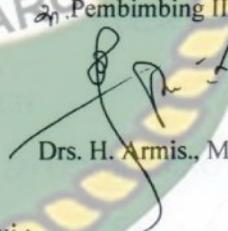
Nama : Rosalina Mardiyani
Npm : 155110997
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Fakultas : Ekonomi
Judul : Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Sektor Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kaupaten Kampar Tahun 2008-2017

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

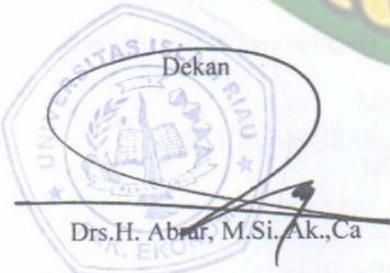

Dra. Hj. Ellyan Sastraningsih, M.Si

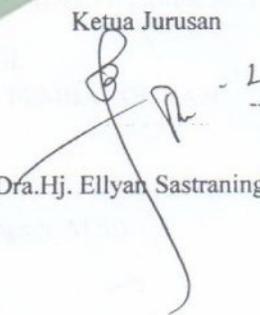

Drs. H. Armis., M.Si

Mengetahui :

Dekan

Ketua Jurusan


Drs.H. Abrar, M.Si, Ak.,Ca


Dra.Hj. Ellyan Sastraningsih,M.Si

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

NAMA : ROSALINA MARDIYANI
NPM : 155110997
FAKULTAS : EKONOMI
JURUSAN : EKONOMI PEMBANGUNAN
JUDUL : ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DI
SEKTOR PENDIDIKAN DAN SEKTOR KESEHATAN
TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2008-2017

TEAM PENGUJI

1. Drs. M. Nur, MM (.....)
2. Hj. Nawarti Bustamam, SE., M.Si (.....)
3. Sinta Yulyanti, SE,M.Ec.Dev (.....)

DISETUJUI OLEH:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

(Dra.Hj. EllyanSastraningsih, M.Si)

(Drs. H. Armis, M.Si)

MENGETAHUI:
KETUA JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN

(Dra.Hj. EllyanSastraningsih, M.Si)



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : ROSALINA MARDIYANI
 NPM : 155110997
 FAKULTAS : EKONOMI
 JURUSAN : EKONOMI PEMBANGUNAN
 JUDUL : ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DI SEKTOR KESEHATAN DAN SEKTOR PENDIDIKAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2008-2017

No	Tanggal	Sponsor	Co Sponsor	Catatan Pembimbing	Paraf
1	7-011-2018	X		Latar Belakang Masalah, Tambah Teori, Penelitian Terdahulu, Analisis Data, Variabel Penelitian	<i>[Signature]</i>
2	15-11-2018	X		Kerangka Pikir	<i>[Signature]</i>
3	19-11-2018	X		Perbaiki Kesalahan Penulisan	<i>[Signature]</i>
4	20-11-2018	X		Acc Seminar Proposal Lanjut Pembimbing II	<i>[Signature]</i>
5	21-11-2018		X	Bahan	<i>[Signature]</i>
6	22-11-2018		X	Revisi Latar Belakang Masalah	<i>[Signature]</i>
7	23-11-2018		X	Acc Seminar	<i>[Signature]</i>
8	10-02-2019		X	Bahan Revisi	<i>[Signature]</i>
9	15-02-2019		X	Koneksi	<i>[Signature]</i>
10	22-02-2019		X	Perbaiki Sesuai Saran	<i>[Signature]</i>
11	11-03-2019		X	Acc Seminar Hasil	<i>[Signature]</i>
12	26-03-2019	X		Perbaikan Rumusan Masalah di Pembahasan Bab V	<i>[Signature]</i>
13	1-04-2019	X		Lengkapi Pembahasan Hasil Penelitian	<i>[Signature]</i>
14	2-04-2019	X		Acc Seminar Hasil	<i>[Signature]</i>

Pekanbaru, 08 Agustus 2018
 Wakil Dekan 1

[Signature]
 Dr. Firdaus A. Rahman, S.E., M.Si., Ak.CA

UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS EKONOMI

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Nama : Rosalina Mardiyani
 NPM : 155110997
 Judul Proposal : Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Kampar
 Pembimbing : 1. Dra. Hj. Ellyan Sastraningsih, M.Si
 2. Drs. H. Armis., M.Si
 Hari/Tanggal Seminar : Kamis 13 Desember 2018

Hasil Seminar dirumuskan sebagai berikut :

1. Judul : Disetujui dirubah/perlu diseminarkan *)
2. Permasalahan : Jelas/masih kabur/perlu dirumuskan kembali *)
3. Tujuan Penelitian : Jelas/mengambang/perlu diperbaiki *)
4. Hipotesa : Cukup tajam/perlu dipertajam/di perbaiki *)
5. Variabel yang diteliti : Jelas/Kurang jelas *)
6. Alat yang dipakai : Cocok/belum cocok/kurang *)
7. Populasi dan sampel : Jelas/tidak jelas *)
8. Cara pengambilan sampel : Jelas/tidak jelas *)
9. Sumber data : Jelas/tidak jelas *)
10. Cara memperoleh data : Jelas/tidak jelas *)
11. Teknik pengolahan data : Jelas/tidak jelas *)
12. Daftar kepustakaan : Cukup/belum cukup mendukung pemecahan masalah Penelitian *)
13. Teknik penyusunan laporan : Telah sudah/belum memenuhi syarat *)
14. Kesimpulan tim seminar : Perlu/tidak perlu diseminarkan kembali *)

Demikianlah keputusan tim yang terdiri dari :

No	Nama	Jabatan pada Seminar	Tanda Tangan
1.	Dra.Hj. Ellyan Sastraningsih, M.Si		
2.	Drs. H. Armis., M.Si		
3.	Drs. M. Nur., MM		
4.	Hj. Nawarti Bustamam, SE., M.Si		
5.	Prof. Dr. H. Detri Karya, SE., MA		
6.	Sinta Yulianti, SE., M.Ec., Dev		

Coret yang tidak perlu

Mengetahui
 An. Dekan bidang Akademis

 Dr. Firdaus AR, SE, M.Si, Ak. CA

Pekanbaru, 13 Desember 2018
 Sekretaris,

Dra.Hj.Ellyan Sastraningsih, M.Si

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Nomor: 785Kpts/FE-UIR/2018

TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA S1

Bismillahirrohmanirrohim

DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang:
1. Surat penetapan Ketua Jurusan / Program Studi Ekonomi Pembangunan Tanggal 12 September 2018 tentang penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa
 2. Bahwa dalam membantu mahasiswa untuk menyusun skripsi sehingga mendapat hasil yang baik perlu ditunjuk Dosen Pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut

- Mengingat :
1. Surat Mendikbud RI
 - a. Nomor: 0880/U/1997
 - b. Nomor: 0213/0/1987
 - c. Nomor: 0378/U/1986
 - d. Nomor: 0387/U/1987
 2. Surat Keputusan BAN PT Depdiknas RI :
 - a. Nomor : 192/SK/BAN-PT/Ak.XVI/S/IX/2013, tentang Akreditasi Eko. Pembangun
 - b. Nomor : 197/SK/BAN-PT/Ak.XVI/S/IX/2013, tentang Akreditasi Manajemen
 - c. Nomor : 197/SK/BAN-PT/Ak.XVI/S/IX/2013, tentang Akreditasi Akuntansi S1
 - d. Nomor : 001/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/I/2014 Tentang Akreditasi D.3 Akuntansi
 3. Surat Keputusan YLPI Daerah Riau
 - a. Nomor: 66/Skep/YLPI/II/1987
 - b. Nomor: 10/Skep/YLPI/IV/1987
 4. Statuta Universitas Islam Riau tahun 2013
 5. Surat Edaran Rektor Universitas Islam Riau tanggal 10 Maret 1987
 - a. Nomor: 510/A-UIR/4-1987

MEMUTUSKAN

- Menetapkan penyusunan :
1. Mengangkat Saudara-saudara yang tersebut namanya di bawah ini sebagai pembimbing dalam skripsi yaitu:

No	Nama	Jabatan/Golongan	Keterangan
1.	Dra. Hj. Ellyan Sastraningsih, M.Si	Lektor Kepala, D/a	Pembimbing I
2	Drs. H. Armis, M.Si	Lektor, C/c	Pembimbing II

2. Mahasiswa yang dibimbing adalah
Nama : Rosalina Mardiyani
NPM : 155110997
Jurusan/Jenjang Pendd.: Ekonomi Pembangunan / S1
Judul Skripsi : Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan sektor kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di kabupaten kampar.
3. Tugas pembimbing adalah berpedoman kepada Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor: 52/UIR/Kpts/1989 tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa di lingkungan Universitas islam Riau.
4. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya memperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal
5. Kepada pembimbing diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
6. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini segera akan ditinjau kembali.
Kutipan: Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan menuru semestinya.

Ditetapkan di: Pekanbaru
Pada Tanggal 14 September 2018

Dekan.

Drs. Abrar, M.Si., Ak., CA



Tembusan : Disampaikan pada:

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : ROSALINA MARDIYANI
TEMPAT/TGL LAHIR : TAP-SEL, 03 JULI 1996
NPM : 155110997
FAKULTAS : EKONOMI
JURUSAN : EKONOMI PEMBANGUNAN
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN
PEMERINTAH DI SEKTOR PENDIDIKAN DAN
SEKTOR KESEHATAN TERHADAP INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA DI KABUPATEN
KAMPAR TAHUN 2008-2017

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini benar adalah murni dari hasil karya saya, bukan merupakan hasil karya orang lain (bukan plagiat/duplikasi) dan sistematika penulisannya sudah mengikuti kaedah dari karya tulis ilmiah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apa bila pernyataan ini tidak benar saya bersedia dituntut untuk hukum yang berlaku.

Pekanbaru, 15 April 2019

Yang Membuat Pernyataan



ROSALINA MARDIYANI



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah subhanallahu wata'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga masih mampu menyelesaikan penyusunan tugas akhir kuliah (Skripsi) ini dengan judul "ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DI SEKTOR PENDIDIKAN DAN SEKTOR KESEHATAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2008-2017.

Penyusunan ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai mengikuti ujian Oral Comprehensive sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyusun skripsi ini dengan sebaik-baiknya, namun penulis menyadari bahwa untuk menyusun skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan dan berfikir penulis. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menerima kritikan dan saran yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini.

Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah banyak memberikan petunjuk, bimbingan, dorongan, dan bantuan dalam penulisan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berkat bantuan dari berbagai pihak, perkenankanlah saya sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs Abrar, M.Si.,Ak.,CA selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau
2. Ibu Dra. Hj. Ellyan Sastraningsih,.M.Si selaku ketua jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau
3. Dra. Hj. Ellyan Sastraningsih,.M.Si selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan saran dan petunjuk serta perhatian kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Drs. H. Armis., M.Si selaku pembimbing II yang penuh kesabaran dan ketelitian dalam memberikan petunjuk kesempurnaan skripsi.

5. Bapak dan ibu dosen beserta staf pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau khususnya pada jurusan Ekonomi Pembangunan.
6. Bapak dan ibu seluruh staf BPS Provinsi Riau yang telah membantu memberikan data dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak dan ibu seluruh staf BPKAD Kabupaten Kampar yang telah membantu memberikan data dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Penulis mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua, Bapak dan Ibu yang telah memberikan dorongan dan kasih sayangnya yang tak terhingga serta abang dan adik tercinta yaitu Sulton Fauzi, Salman Al-Farisi, Lsa Tsamrotul Fu'adah dan Daffa Oka Ramadhani yang selalu memberikan support pada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan penuh harapan dan keinginan dalam mencapai cita-cita.
9. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada sahabat yaitu Eka Syah Puti Pohan beserta keluarga besar assabiil yang telah memberi semangat pada penulis serta teman teman angkatan 2015 yang telah bekerjasama dalam beberapa tahun ini.
10. Dan semua pihak yang belum disebutkan namanya, penulis mengucapkan terimakasih atas dukungan yang telah diberikan kepada penulis.

Dari semua pihak yang belum disebutkan maupun yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, dengan tanpa maksud mengucilkan bantuan yang telah diberikan, semoga Allah subhanallahu wata'la meridhoi membalas semua kebaikan yang telah diberikan pada penulis dengan tulus dan ikhlas serta dilimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Pekanbaru, 11 April 2019

Penulis

ROSALINA MARDIYANI

Daftar Isi

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS	12
2.1 LandasanTeori	12
2.1.1Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	12
2.1.2 Pengeluaran Pemerintah.....	16
2.1.3 Hubungan Pengeluaran Pemerintah	21
2.2 PenelitianTerdahulu	23
2.3 Kerangka Pikir Penelitian.....	24
2.4 Hipotesis.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1 Lokasi Penelitian	27
3.2 Populasi Penelitian	27
3.3 Jenis dan Sumber Data	27
3.4 Teknik dan Pengumpulan Data	28
3.5 Operasional Variabel Penelitian.....	28
3.6 Teknik Analisis Data.....	30
BAB 1V GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	35
4.1 Letak dan Keadaan Geografis Kabupaten Kampar	35

4.2 Kondisi Demografi Kabupaten Kampar.....	37
4.3 Pemerintahan.....	38
4.4 Pendidikan.....	39
4.5 Kesehatan.....	42
4.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	43
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
5.1 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan di Kabupaten Kampar.....	44
5.1.1 Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan di Kabupaten Kampar.....	44
5.1.2 Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan di Kabupaten Kampar..	46
5.1.3 Analisis Data Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan di Kabupaten Kampar.....	48
5.1.4 Interpretasi Hasil.....	49
5.5 Pembahasan Hasil Penelitian.....	53
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	56
6.1 Kesimpulan.....	56
6.2 Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Riau tahun 2008-2017..... 3
Tabel 1.2	Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan Kabupaten Kampar 2008-2017 8
Tabel 4.1	Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Luas Wilayah di Kabupaten Kampar tahun 2017 36
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Kabupaten Kampar menurut Kecamatan dan Laju Pertumbuhan Penduduk ³ 38
Tabel 4.3	Persentase Penduduk Usia 7-24 tahun Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur Sekolah dan Partisipasi Sekolah di Kabupaten Kampar Tahun 2017 40
Tabel 4.4	Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Kampar tahun 2010-2017 41
Tabel 4.5	Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten kampar tahun 2010-2017 42
Tabel 5.1	Nilai Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan di Kabupaten Kampar 45
Tabel 5.2	Nilai Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan di Kabupaten Kampar 47

ABSTRAK

ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DI SEKTOR PENDIDIKAN DAN SEKTOR KESEHATAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2008-2017

Oleh : Rosalina Mardiyani

(Dibawah bimbingan : Pembimbing I : Dra. Hj. Ellyan Sastraningsih,M.Si
Pembimbing II : Drs. H. Armis,M.Si)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan sektor kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Kampar Tahun 2008-2017. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Riau dan Badan Pengelola Keuangan Aset dan Daerah Kabupaten Kampar. Model analisis yang digunakan adalah regresi berganda, dengan menggunakan Eviews 9. Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif, yaitu sebesar 0,00229 dan secara statistik signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Dan variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh negatif, yaitu sebesar 0,9399, dan secara statistik berpengaruh negatif terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Kampar.

Kata Kunci: Pendidikan, Kesehatan, Indeks Pembangunan Manusia

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE EFFECT OF GOVERNMENT EXPENDITURE IN EDUCATION AND HEALTH SECTOR SECTOR ON HUMAN DEVELOPMENT INDEX IN KAMPAR DISTRICT, 2008-2017

By: Rosalina Mardiyani

(Under guidance: Advisor I: Dra. Hj. Ellyan Sastraningsih, M.Sc Advisor II: Drs.
H. Armis, M.Si)

This study aims to determine the effect of government spending in the education sector and the health sector on the human development index (HDI) in Kampar District in 2008-2017. The data used is secondary data obtained from the Riau Provincial Statistics Agency and the Asset and Financial Management Agency of the Kampar Regency. The analytical model used is multiple regression, using Eviews 9. The regression results show that the government expenditure variable in the education sector has a positive effect, which is equal to 0.0029 and is statistically significant towards the human development index. And the health sector government expenditure variable has a negative effect, which is equal to 0.9399, and statistically has a negative effect on the human development index in Kampar District.

Keywords: Education, Health, Human Development Index

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indeks Pembangunan manusia dapat dikatakan sebagai suatu proses untuk perluasan pilihan yang lebih banyak kepada penduduk melalui upaya-upaya pemberdayaan yang mengutamakan peningkatan kemampuan dasar manusia agar dapat sepenuhnya berpartisipasi di segala bidang pembangunan (UNDP,1990). Pada dasarnya tujuan dari pembangunan ini yaitu dengan memperbanyak pilihan kepada penduduk dimana pilihan-pilihan ini tidak terbatas dan dapat berubah kapan saja, sehingga penduduk bisa memperoleh akses yang lebih besar terhadap pengetahuan dan pendidikan, pelayanan kesehatan yang lebih baik, dan mata pencaharian yang aman dan sebagainya. Tujuan akhir dari pembangunan ini juga bisa dikatakan untuk menciptakan lingkungan yang dapat memungkinkan masyarakat hidup dengan aman dan nyaman, sehat dan kreatif.

Paradigma pembangunan yang sedang berkembang saat ini adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur oleh pembangunan manusia yang dilihat dengan tingkat kualitas hidup manusia ditiap-tiap negara (Rahmita Handayani,2015:1). Pembangunan ekonomi yang menggambarkan telah terjadinya peningkatan barang dan jasa yang dihasilkan sebagai syarat yang di perlukan bagi proses pembangunan. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, dengan demikian pertumbuhan ekonomi bukanlah gambar ekonomi sesaat saja, melainkan suatu proses yang di dalamnya suatu perekonomian yang berubah dari waktu ke waktu.

Salah satu tolak ukur yang digunakan dalam melihat kualitas hidup manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang di ukur melalui kualitas tingkat pendidikan, kesehatan dan ekonomi (daya beli) . Melalui peningkatan ketiga indikator tersebut diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas hidup manusia (Merang Kahang dkk,2016:3). Daya beli ini merupakan kemampuan masyarakat sebagai konsumen untuk membeli barang atau jasa yang dibutuhkan. Daya beli masyarakat ini ditandai dengan meningkat atau menurun, dimana daya beli meningkat jika lebih tinggi dibanding periode lalu sedangkan daya beli menurun ditandai dengan lebih tingginya kemampuan beli masyarakat dari pada periode sebelumnya. Dalam hal ini kemampuan daya beli masyarakat (PPP) atau pengeluaran perkapita yang disesuaikan di kabupaten kampar mulai dari tahun 2008 adalah 64.015 juta rupiah, 2009 berkisar 64.434 juta rupiah, 2010 adalah 10.433 juta rupiah, pada tahun 2011 adalah 10.513 juta rupiah, 2012 sekitar 10.593 juta rupiah, 2013 mengalami kenaikan 10.624 juta rupiah, selanjutnya 2014 naik sebesar 10.651 juta rupiah, tahun 2015 sebesar 10.710 juta rupiah, tahun 2016 naik menjadi 10.765, dan sampai akhir tahun 2017 naik sebesar 10.912 juta rupiah.

Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu indikator bagi kemajuan suatu negara, dimana pembangunan suatu negara belum bisa dikatakan berhasil apabila dilihat hanya dari besarnya pendapatan domestik bruto tanpa adanya upaya peningkatan pembangunan manusianya sendiri, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi masyarakatnya (Cliff Laisina,dkk,2015:2).

Tinggi rendahnya kualitas sumber daya manusia akan ditentukan oleh tingkat kesehatan, pendidikan dan tingkat pendapatan perkapitanya.

Tabel 1.1 : Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Riau dan Kabupaten Kampar tahun 2008-2017

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Riau	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kampar
2008	66.86	66.64
2009	67.42	67.14
2010	68.65	68.62
2011	68.90	69.64
2012	69.15	70.08
2013	69.91	70.46
2014	70.33	70.72
2015	70.84	71.28
2016	71.20	71.39
2017	71.79	72.19

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau 2018

Indeks Pembangunan Manusia di Riau 2018 termasuk yang paling cepat kenaikannya di pulau sumatra ini. Kenaikan ratio ini dipicu oleh besarnya pendapatan domestik bruto di setiap kabupaten. Dapat dilihat setiap tahunnya Riau terus mengalami peningkatan yang baik, angka Indeks Pembangunan Manusia yang paling tinggi di provinsi Riau terdapat pada tahun 2017 yaitu sebesar 71,79% dan nilai Indeks Pembangunan Manusia yang terendah di Provinsi Riau terdapat pada tahun 2008 sebesar 66,86%.

Kabupaten Kampar termasuk kabupaten yang telah berkembang pesat dengan kemajuan pembangunan di Provinsi Riau pada saat ini terutama pada Indeks Pembangunan Manusianya (IPM). Indeks Pembangunan yang terjadi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang baik. Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa indeks pembangunan manusia Kabupaten Kampar pada tahun 2008 sebesar

66,64% dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan dengan kisaran 72,19%. Hal tersebut berarti kinerja pemerintah Kabupaten Kampar menunjukkan performa yang baik. Jadi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau dan Kabupaten Kampar mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Data dalam tabel IPM ini menggunakan Metode Baru, yang mana metode baru ini merupakan perubahan dari metode sebelumnya agar penghitungannya lebih relevan. Metode baru ini menggunakan beberapa indikator yaitu rata-rata lama sekolah, angka harapan lama sekolah agar bisa didapatkan gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi, dan PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah serta penghitungannya menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dan dapat diartikan bahwa capaian capaian suatu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian dimensi lain. Artinya untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya (BPS Riau:2015).

Oleh karenanya dibutuhkan investasi untuk dapat menciptakan pembentukan sumber daya manusia yang produktif. Dalam hal ini modal manusia dapat mengacu pada pendidikan dan juga kesehatan. Pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar di suatu wilayah.

Pendidikan adalah modal manusia untuk dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan. Pendidikan pada dasarnya adalah bentuk dari tabungan yang menyebabkan akumulasi modal manusia dan pertumbuhan output agregat jika modal manusia merupakan input dalam fungsi produksi agregat. Kesehatan

merupakan inti dari kesejahteraan, dan pendidikan adalah hal yang pokok untuk mencapai kehidupan yang layak. Pendidikan memiliki peran yang penting dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Pendidikan yang diberikan kepada para pelajar tidak hanya pendidikan yang sebatas teori saja namun harus berdasarkan prakteknya juga, serta menanamkan pendidikan yang berdasarkan agama agar dapat mewujudkan anak bangsa yang cerdas serta berahlak baik.

Kesehatan merupakan salah satu bagian penting dalam upaya pembangunan kualitas hidup manusia. Pemenuhan kebutuhan kesehatan oleh pemerintah merupakan salah satu kewajiban pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduknya. Kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan, sudah seharusnya pemerintah menyediakan sarana publik seperti kesehatan untuk meningkatkan produktivitas pembangunan manusia. Sarana kesehatan dan jaminan kesehatan harus dirancang sedemikian rupa oleh pemerintah melalui pengeluaran pemerintah.

Pengeluaran pemerintah dapat dikelompokkan dalam dua golongan yaitu: *Pengeluaran Rutin*; pengeluaran rutin adalah pengeluaran yang secara rutin setiap tahunnya dilakukan oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan roda pemerintahan, yang terdiri dari: belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan. *Pengeluaran Pembangunan*; pengeluaran pembangunan adalah pengeluaran yang bersifat menambah modal masyarakat

dalam bentuk pembangunan baik prasarana fisik dan non fisik, yang tujuannya untuk membiayai program-program pembangunan pemerintah daerah.

Tujuan dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan adalah salah satunya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dapat di wujudkan dengan berbagai pemenuhan kebutuhan, seperti pendidikan dan kesehatan. Pemenuhan kebutuhan pendidikan dan kesehatan akan dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.

Pemerintah berusaha meningkatkan investasi sumber daya manusia yang dimiliki dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi memungkinkan dapat meningkatkan output dan pendapatan dimasa yang akan mendatang sehingga dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM ditandai dengan adanya perkembangan pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi pada setiap tahunnya, meskipun mengalami keadaan yang fluktuatif. Hal ini selaras dengan peningkatan pengeluaran pemerintah total dari tahun ke tahun. Pengeluaran pemerintah di Indonesia dapat dilihat dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) pada sisi belanja negara atau pengeluaran. Sebenarnya ada perubahan unsur pengeluaran dengan adanya desentralisasi. Sebelum desentralisasi, pengeluaran pemerintah terdiri dari anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Sedangkan setelah desentralisasi, pengeluaran pemerintah terdiri dari anggaran pemerintah pusat dan anggaran daerah yaitu APBD. Namun, besarnya pengeluaran pemerintah baik sebelum maupun setelah desentralisasi masih sama tergantung proyeksi pendapatan negara.

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah produk domestik bruto. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), PDB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang atau jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Pada prekonomian Indonesia, PDB mengalami peningkatan setiap tahunnya dan laju pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif. Provinsi riau sendiri memiliki pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan laju pertumbuhan ekonomi.

Pengeluaran pemerintah merupakan suatu jenis kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah sebagai salah satu langkah untuk mensejahterakan masyarakatnya dan menuju pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah terhadap sektor pendidikan merupakan bagian dari pengeluaran pemerintah yang memacu kesejahteraan masyarakat dan pada akhirnya memepengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pengeluran pemerintah tidak hanya bentuk beasiswa ataupun bantuan pendidikan, bantuan bagi orang yang kurang mampu, namun pengeluaran di sektor pendidikan juga termasuk fisik dan non fisik. Anggaran dalam bentuk fisik seperti, pembuatan bangunan ruang pendidikan, pembuatan gedung sekolah, perlengkapan komputer, alat tulis kantor, dan lain sebagainya.

Tabel 1.2 : Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Kabupaten Kampar 2008-2017 (Rp)

Tahun	Sektor Pendidikan	Sektor Kesehatan
2008	419.078.131.111,89	69.711.633.660,00
2009	471.558.944.932,00	60.060.868.558,00
2010	515.812.147.952,00	61.867.794.466,00
2011	671.468.180.334,00	75.702.547.057,00

2012	687.178.416.410,00	82.565.443.243,00
2013	807.501.687.350,00	99.722.043.448,00
2014	936.160.809.411,00	141.687.069.495,00
2015	943.150.209.451,00	157.578.573.457,00
2016	932.664.626.109,00	171.546.325.564,00
2017	837.593.260.160,00	187.867.042.368,00

Sumber : BPKAD Kabupaten Kampar 2018

Berdasarkan Tabel 1.3 Jumlah total pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan mengalami ketidak stabilan, dari tahun 2008 hingga 2016 terus mengalami peningkatan pengeluaran yaitu sebesar Rp 419.078.131.111,89 di tahun 2008 sedangkan Rp 932.664.626.109,00 ditahun 2016 dan di tahun 2017 pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan mengalami penurunan yang drastis yaitu sebesar 837.593.260.160,00. Selanjutnya dalam sektor kesehatan beda dengan sektor pendidikan yang mana dalam sektor pendidikan mengalami penurunan di tahun 2017 sedang kan sektor kesehatan terus mengalami peningkatan yang baik. Dalam sektor kesehatan pada tahun 2008 total pengeluarannya sebesar 69.711.633.660,00 dan pada tahun 2017 otal pengeluaran di Kabupaten Kampar sebesar 187.867.042.368,00. Pengeluaran Pemerintah terhadap sektor pendidikan dan sektor kesehatan merupakan bagian dari pengeluaran pemerintah yang memacu kesejahteraan masyarakat dan pada akhirnya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi serta pembangunan manusia.

Berhasil atau tidaknya suatu bangsa banyak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan penduduknya. Semakin maju pendidikan berarti akan membawa berbagai pengaruh positif bagi masa depan diberbagai bidang kehidupan. Pentingnya peranan pendidikan sudah disadari oleh seluruh masyarakat di Riau, hal ini terlihat dari tingginya Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi

Murni (APM) dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA setiap tahun yang selalu mengalami peningkatan (Rahmita Handayani:2015:6).

Berdasarkan uraian di atas dan dengan asumsi-asumsi teori yang ada maka, penulis tertarik membuat penelitian ini dengan judul "Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Sektor Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Kabupaten Kampar Tahun 2008-2019"

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat di ambil kesimpulan pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah disektor pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Kampar?
2. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah disektor kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Kampar?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah disektor pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupatem Kampar
2. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah disektor kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupatem Kampar

1.4. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagi penulis, diharapkan dapat lebih memahami pengaruh pengeluaran pemerintah disektor pendidikan dan kesahatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kampar
2. Bagi institusi pendidikan, dapat menjadi referensi bagi calon peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian dalam aspek yang sama maupun dari pengembangan penelitian ini.
3. Bagii pemerintah, sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam pengembalian keputusan serta sebagai bahan informasi dan referensi.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman, maka diperlukan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sisitematika penulisan

BAB II: LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

Pada bab ini dicantumkan tentang teori-teori pendukung mengenai masalah yang diangkat, riview penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran serta pengembangan hipotesis penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada Bab ini menguraikan metodologi penelitian yang meliputi: Lokasi Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Populasi dan Sampel, Pengumpulan Data.

BAB IV: GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

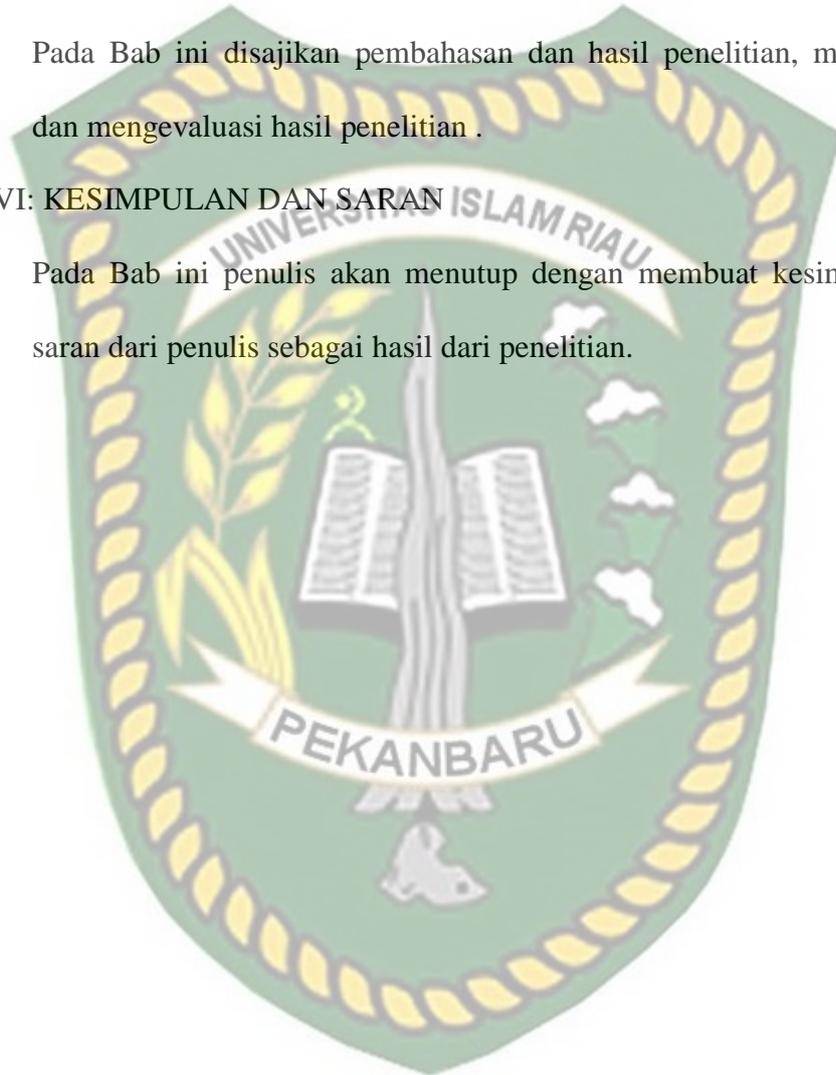
Pada Bab ini menguraikan gambaran umum daerah penelitian Kabupaten
Kampar

BAB V: PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini disajikan pembahasan dan hasil penelitian, menganalisis
dan mengevaluasi hasil penelitian .

BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab ini penulis akan menutup dengan membuat kesimpulan dan
saran dari penulis sebagai hasil dari penelitian.



BAB II

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai “suatu proses untuk perluasan pilihan yang lebih banyak kepada penduduk” melalui upaya-upaya pemberdayaan yang mengutamakan peningkatan kemampuan dasar manusia agar dapat sepenuhnya berpartisipasi di segala bidang pembangunan. IPM adalah angka yang diolah berdasarkan tiga dimensi yaitu:

1. Panjang usia (*longevity*), yang diukur berdasarkan angka harapan hidup saat lahir.
2. Pengetahuan (*knowledge*), yang diukur berdasarkan angka melek huruf orang dewasa dan gabungan partisipasi sekolah di tingkat sekolah dasar, menengah, dan perguruan tinggi (dengan pembobotan yang sama pada kedua indikator).
3. Standar hidup (*standar of living*) suatu bangsa yang diukur oleh pendapatan riil per kapita.

Secara teknis ketiga dimensi ini dijabarkan menjadi beberapa indikator yaitu kesehatan (dan kependudukan), pendidikan, serta ekonomi. Ini berarti pembangunan manusia merupakan manifestasi dari aspirasi dan tujuan suatu bangsa yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan secara struktural melalui upaya yang sistematis. Pembangunan manusia merupakan suatu upaya untuk

memperluas pilihan-pilihan yang dimiliki manusia yang dapat terealisasi apabila manusia berumur panjang dan sehat, memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta dapat memanfaatkan kemampuan yang dimilikinya dalam kegiatan yang produktif. Hal tersebut sekaligus merupakan tujuan utama dari pembangunan yaitu untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan dan kesehatan merupakan modal utama yang harus dimiliki manusia agar mampu meningkatkan potensinya. Umumnya semakin tinggi kapabilitas dasar yang dimiliki suatu bangsa, semakin tinggi peluang untuk meningkatkan potensi bangsa itu.

Dari ketiga dimensi tersebut bukanlah suatu ukuran yang menyeluruh tentang pembangunan manusia. Sebagai contoh, indeks pembangunan manusia tidak menyertakan indikator-indikator penting seperti penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan politik. Indeks ini memberikan sudut pandang yang lebih luas untuk menilai kemajuan manusia serta meninjau hubungan yang rumit antara penghasilan dan kesejahteraan (UNDP, 2004).

Indikator Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu cara untuk mengukur taraf kualitas fisik dan non fisik penduduk. Kualitas fisik tercermin dari angka harapan hidup sedangkan kualitas non fisik (intelektualitas) tercermin melalui lamanya rata-rata penduduk bersekolah dan angka melek huruf dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat yang tercermin dari nilai Purchasing Power Parity Indeks (PPP) (Adi:2011:2). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur pencapaian keseluruhan dari suatu daerah/negara dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu panjang usia, pengetahuan dan

standar hidup. Ketiganya diukur dengan angka harapan hidup, pencapaian pendidikan, dan pengeluaran perkapita (BPS,2007).

Ada beberapa komponen Indeks Pembangunan Manusia antara lain,yaitu:

1. Indeks Pendidikan

Perhitungan Indeks Pendidikan (IP) mencakup dua indikator yaitu angka melek huruf (LIT) dan rata-rata lama sekolah (MYS). Populasi yang digunakan adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas karena pada kenyataannya penduduk usia tersebut sudah ada yang berhenti sekolah. Batasan ini diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya, mengingat penduduk yang berusia kurang dari 15 tahun masih dalam proses sekolah atau akan sekolah sehingga belum pantas untuk rata-rata lama sekolahnya. Kedua indikator pendidikan ini dimunculkan dengan harapan dapat mencerminkan tingkat pengetahuan (cerminan angka LIT), dimana LIT merupakan proporsi penduduk yang memiliki kemampuan baca tulis dalam suatu kelompok penduduk secara keseluruhan. Sedangkan cerminan angka MYS merupakan gambaran terhadap keterampilan yang dimiliki penduduk.

2. Indeks Harapan Hidup

Indeks Harapan Hidup menunjukkan jumlah tahun hidup yang diharapkan dapat dinikmati penduduk suatu wilayah. Dengan memasukan informasi mengenai angka kelahiran dan kematian pertahun, variabel tersebut diharapkan akan mencerminkan rata-rata lama hidup sekaligus hidup sehat masyarakat. Sehubungan dengan sulitnya mendapatkan informasi orang yang meninggal pada kurun waktu tertentu, maka untuk menghitung angka harapan hidup digunakan

metode tidak langsung. Data dasar yang dibutuhkan dalam metode ini adalah rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak masih hidup dari wanita pernah kawin. Untuk mendapatkan Indeks harapan hidup dengan cara menstandarkan angka harapan hidup terhadap nilai maksimum dan minimumnya.

3. Indeks Daya Beli (Indeks Pendapatan)

Kemampuan daya beli penduduk atau purchasing power parity (PPP) merupakan suatu indikator yang digunakan untuk melihat kondisi ekonomi masyarakat dalam menghitung indeks pembangunan manusia. Kemampuan daya beli ini lebih mencerminkan kemampuan masyarakat secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan konsumsinya, dan sangat jauh berbeda dengan PDRB perkapita atau yang dikenal dengan pendapatan perkapita. Untuk mengukur standar hidup, data PDRB perkapita tidak dapat digunakan karena bukan ukuran yang peka untuk kemampuan daya beli penduduk. Oleh sebab itu, perhitungan daya beli penduduk menggunakan konsumsi perkapita yang kemudian disesuaikan.

Setelah dilakukan perhitungan pengeluaran perkapita setahun yang disesuaikan, selanjutnya perhitungan indeks pendapatan. Indeks pendapatan menunjukkan kemampuan daya beli masyarakat, oleh karena itu semakin tinggi indeks pendapatan maka semakin tinggi daya beli perkapita penduduk. Peningkatan kemampuan daya beli secara implisit menunjukkan kenaikan kesejahteraan melalui kenaikan pendapatan dan stabilitas harga, sehingga pada akhirnya mutu pembangunan manusia meningkat. Konsep tersebut lebih mengonsumsikan bahwa kenaikan indeks daya beli atau kenaikan pengeluaran

perkapita rill yang disesuaikan sejalan dengan kenaikan pendapatan absolut dan pendapatan rill. Meskipun demikian, suatu hal yang ekstrim bisa saja terjadi, dimana kenaikan pengeluaran rill perkapita lebih disebabkan oleh insentif stabilitas inflasi, sehingga kemungkinan kenaikan pendapatan absolut sebenarnya rill tidak terjadi (Maqin,2007).

Merujuk pada ketiga indikator indeks pembangunan manusia, maka angka indeks pembangunan manusia dapat dihitung dengan menggunakan rumus (BPS,2004):

$$IPM = 1/3 \times (IPD \times IHH \times IP)$$

Keterangan: IPM (Indeks Pembangunan Manusia)

IPD (Indeks Pendidikan)

IHH (Indeks Harapan Hidup)

IP (Indeks Pendapatan/Daya Beli)

2.1.2 Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran Pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output, maupun kesempatan kerja dan memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2000).

Pertumbuhan ekonomi mengandung pengertian yaitu sebagai penambahan dari pendapatan nasional atau regional yang terjadi pada suatu negara atau daerah dari satu tahun ketahun berikutnya yang memberikan indikasi sejauh mana aktivitas perekonomian yang terjadi memberikan tambahan pada pendapatan masyarakat.

Pengeluaran pemerintah digunakan untuk membiayai sektor-sektor publik yang penting, diantara kesemua sektor publik saat ini yang menjadi prioritas pemerintah dalam mencapai pembangunan kualitas sumber daya manusia adalah investasi pada sektor pendidikan dan kesehatan. Diharapkan investasi pada sektor ini akan berpengaruh pada peningkatan kualitas SDM dan mengurangi kemiskinan. Pembangunan kesehatan dan pendidikan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang antara lain diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam pengukuran IPM, kesehatan dan pendidikan adalah salah satu komponen utama selain pendapatan. Kesehatan serta pendidikan juga merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pemerintah sebagai pelaksana pembangunan membutuhkan manusia yang berkualitas sebagai modal dasar bagi pembangunan. Oleh karenanya dibutuhkan investasi untuk dapat menciptakan pembentukan sumber daya manusia yang produktif (Usmaliadanti, 2011).

Akumulasi pengeluaran pemerintah pada belanja pembangunan, merupakan investasi sekaligus campur tangan pemerintah dalam mewujudkan peningkatan indeks pembangunan manusia di Indonesia. Pada dasarnya HDI (*Human Development Index*) atau IPM (Indeks Pembangunan Manusia) adalah

satuan yang dikembangkan UNDP guna mengukur kesuksesan pembangunan suatu negara.

Pengeluaran pemerintah juga menyangkut seluruh pengeluaran untuk membiayai kegiatan-kegiatannya, pengeluaran tersebut bertujuan agar tercapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pengeluaran pemerintah ini yang dikeluarkan pemerintah untuk membiayai konsumsi pemerintah, kegiatan-kegiatan dan pengeluaran lainnya guna tercapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Menurut Suparmoko (2000:176) bahwa pengeluaran pemerintah dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Pengeluaran itu merupakan investasi yang menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi dimasa yang akan mendatang
2. Pengeluaran ini langsung memberikan kesejahteraan dan kegembiraan bagi masyarakat
3. Merupakan penghematan pengeluaran yang akan datang
4. Menyediakan kesempatan kerja lebih banyak dan penyebaran tenaga beli yang lebih luas

Sedangkan macam-macam pengeluaran pemerintah, yaitu:

- 1) Pengeluaran yang self liquiditing sebagian atau seluruhnya, artinya pengeluaran pemerintah mendapatkan pembayaran kembali dari masyarakat yang menerima jasa-jasa dan barang-barang yang bersangkutan. Misalnya pengeluaran untuk jasa-jasa perusahaan pemerintah atau untuk proyek - proyek produktif.

- 2) Pengeluaran yang reproduktif, artinya mewujudkan keuntungan ekonomis bagi masyarakat, yang dengan naiknya tingkat penghasilan dan sasaran pajak yang lain pada akhirnya akan menaikkan penerimaan pemerintah. Misalnya, pemerintah menetapkan untuk bidang pertanian, pendidikan, dan pengeluaran untuk menciptakan lapangan kerja, serta memicu peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat.
- 3) Pengeluaran yang tidak termasuk *self liquidating* dan reproduktif, yaitu pengeluaran yang secara langsung menambahkan kegembiraan dan kesejahteraan masyarakat. Misalnya untuk bidang rekreasi, pendirian monumendan sebagainya.
- 4) Pengeluaran yang secara langsung tidak produktif dan merupakan pemborosan. Misalnya untuk pembiayaan pertahanan atau perang, meskipun pada saat pengeluaran terjadi penghasilan yang menerimanya akan naik.
- 5) Pengeluaran yang merupakan penghematan di masa yang akan datang. Misalnya pengeluaran untuk anak-anak yatim piatu, pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan masyarakat.

Adapun teori pengeluaran pemerintah dapat dikelompokan menjadi dua bagian yaitu teori mikro dan teori makro, yaitu sebagai berikut:

1) Pengeluaran pemerintah secara mikro

Teori mikro mengenai pengeluaran pemerintah menyangkut faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya permintaan akan barang-barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran pemerintah:

- a. Perubahan permintaan akan barang publik
- b. Perubahan dari aktivitas pemerintah dalam menghasilkan barang publik
- c. Perubahan kualitas barang publik
- d. Perubahan harga faktor-faktor produksi

2) Pengeluaran pemerintah secara Makro

Versi Keynes pengeluaran pemerintah merupakan salah satu unsur permintaan agregat. Konsep perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran bahwa $Y=C+I+G+(X-M)$. Dimana (Y) merupakan pendapatan nasional, (C) merupakan pengeluaran konsumsi, (G) merupakan pengeluaran pemerintah. Menurut Keynes, dengan membandingkan nilai (G) terhadap (Y) serta mengamati dari waktu ke waktu dapat diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pembentukan pendapatan nasional (Dumairy,1996:152).

Teori pembangunan dan pengeluaran pemerintah dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. (1) Tahap awal, perkembangan ekonomi persentase investasi besar, sebab pemerintah harus menyediakan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, transportasi dan sebagainya. (2) Tahap menengah, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun peran investasi swasta sudah semakin membesar. (3) Tahap lanjut, pembangunan ekonomi dan aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas

sosial seperti program kesejahteraan hari tua dan program pelayanan kesehatan masyarakat (Mangkoesebroto, 2008:145).

2.1.3 Hubungan Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan dengan IPM

Pengeluaran pemerintah merupakan cerminan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Demikian pula halnya dengan pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan yang tujuannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat meningkatkan IPM. Pemerintah sebagai pelaksana pembangunan tentunya membutuhkan SDM yang berkualitas sebagai modal pembangunan. Manusia dalam perannya merupakan subjek dan objek pembangunan yang berarti manusia sebagai pelaku dari pembangunan juga menjadi sasaran pembangunan (Putera: 2015).

Dalam UU no 20 tahun 2003 disebutkan bahwa pemerintah, baik pusat maupun daerah harus mengalokasikan 20% anggaran untuk bidang pendidikan diluar gaji dan biaya kedinasan. Jadi, anggaran pendidikan termasuk kategori anggaran pembangunan karena termasuk didalamnya anggaran gaji dan lain-lain. Sedangkan untuk kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia sesuai UU No 36 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa besarnya anggaran kesehatan pemerintah pusat dialokasikan minimal 5% dari APBN di luar gaji, sementara besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10% dari APBD diluar gaji. Tanpa adanya kesehatan masyarakat tidak dapat menghasilkan suatu produktivitas bagi negara. Kegiatan ekonomi suatu negara akan berjalan jika ada jaminan kesehatan bagi setiap penduduknya (Putera, 2015).

Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dibutuhkan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Dalam hal ini dibutuhkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendorong peran manusia dalam pembangunan. Pemerintah melakukan pengeluaran atau yang ditujukan untuk pembangunan manusia. Dalam hal ini pengeluaran pemerintah tersebut digunakan untuk membiayai sektor publik yang lebih penting dan menjadi prioritas dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang tercermin dalam indeks pembangunan (Adi: 2011).

Pengeluaran pemerintah sangat berhubungan dengan IPM artinya, semakin besar peningkatan pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan akan meningkatkan kualitas SDM, maka secara otomatis IPM akan mengalami peningkatan. Teori Rostow dan Musgrave adalah pandangan yang timbul dari pengamatan atas pengalaman pembangunan ekonomi yang yang di alami banyak negara tetapi tidak didasarioleh suatu teori tertentu. Selain tidak jelas apakah tahap pertumbuhan ekonomi terjadi dalam tahap demi tahap atau beberapa tahap dapat terjadi secara simultan . Pendidikan dan kesehatan yang baik akan meningkatkan kapasitas dan kemerdekaan hidup yang dinamakan manfaat intriksik. Pendidikan dan kesehatan berperan membuka peluang yang lebih tinggi yang dinamakan manfaat instrumental (Petter, dkk 2001:112). Pendidikan dan kesehatan penduduk sangat menentukan kemampuan untuk menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baik dalam kaitannya dengan teknologi sampai kelembagaan yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Dengan

pendidikan yang baik, pemanfaatan teknologi ataupun inovasi teknologi menjadi mungkin untuk terjadi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian tentang pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian tersebut digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian ini. Adapun peneliti terdahulu yang relevan dengan penelitian ini antara lain:

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1.	Rahmita Handayani, 2015	Analisis Pengeluaran Pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau	Dari hasil penelitian ini bahwa hasil analisisnya yaitu pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM Provinsi Riau.
2.	Merang Kahang, Muhammad Saleh, Rachmad Budi Suharto, 2016	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kutai Timur	Dimana hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kutai Timur, sedangkan pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kutai Timur.
3.	M. Alyuriza Syalkafi, 2016	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah Sektor	Variabel pertumbuhan ekonomi dan variabel pengeluaran pemerintah di

	pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung pada tahun 1999-2014	sektor pendidikan dan sektor kesehatan secara bersama-sama berpengaruh positive dan signifikan terhadap variabel Indeks Pembangunan Manusia.
--	--	--

2.3. Kerangka Pikir Penelitian

Konsep pembangunan selama ini hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi, padahal pencapaian kesejahteraan masyarakat tidak cukup hanya dengan menekankan pada pembangunan ekonomi dan infrastruktur fisik, melainkan juga dengan pembangunan manusia. Adanya pergeseran paradigma pembangunan memerlukan keselarasan antara pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia mengukur pencapaian keseluruhan dari suatu daerah/negara dalam tiga dimensi mendasar pembangunan manusia, yaitu panjang usia, pengetahuan dan standar hidup. Ketiganya diukur dengan angka harapan hidup, pencapaian pendidikan, dan pengeluaran perkapita.

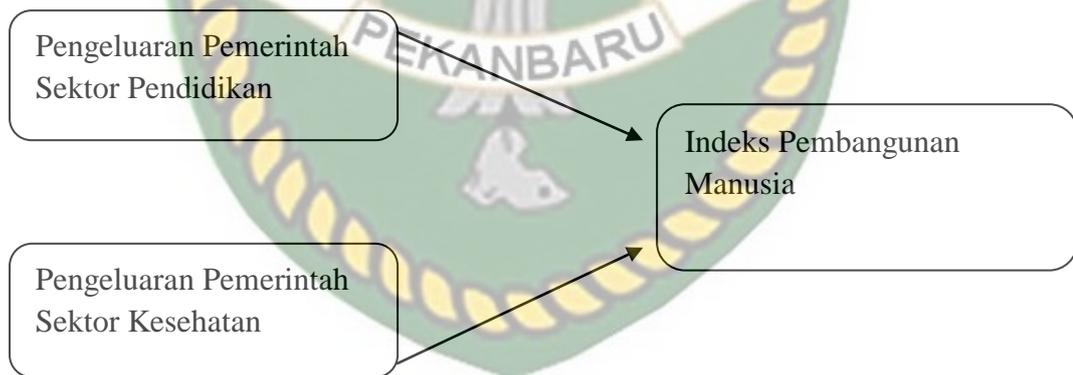
Seperti halnya di Kabupaten Kampar pengeluaran pemerintahnya digunakan untuk membiayai sektor-sektor publik yang penting, yang menjadi prioritas pemerintah dalam mencapai pembangunan kualitas sumber daya manusia ini adalah investasi pada sektor pendidikan dan kesehatan. Dalam pengukuran IPM, kesehatan dan pendidikan adalah salah satu komponen utama selain pendapatan dan juga merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan di Kabupaten kampar dianalisis dengan menggunakan persamaan regresi linier berganda yaitu $Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + e$ untuk mengetahui pengaruhnya terhadap IPM. Karena jika alokasi pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan sektor kesehatan dikembangkan dengan baik maka akan berpengaruh positif terhadap IPM.

Secara singkat kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan pada

Gambar 1. Penelitian ini akan menggunakan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan sebagai determinan IPM Kabupaten Kampar.

Gambar 1 : Bagan Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan landasan teori, dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga pengeluaran pemerintah disektor pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kampar

2. Diduga pengeluaran pemerintah disektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kampar



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengambil lokasi di Kabupaten Kampar, dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Kampar merupakan suatu kategori daerah terpadat di Provinsi Riau yang mengalami perkembangan dalam pembangunan.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Karena penelitian ini menggunakan data sekunder, maka dalam penulisan ini tidak terdapat populasi dan sampel dalam penelitian.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berbentuk angka kuantitatif tahunan dari 2010 hingga 2017. Data sekunder adalah data yang diambil dari sumber lain yang sudah ada sebelumnya dan diolah kemudian disajikan dalam bentuk penelitian ataupun jurnal-jurnal. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, meliputi data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2008-2017.
2. Data dari BPKAD Kabupaten Kampar, meliputi data APBD Kabupaten Kampar untuk bidang pendidikan dan kesehatan tahun 2008-2017.

3. Sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian, seperti internet, buku serta hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.4 Teknik dan Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan, yaitu suatu metode pengumpulan data dan informasi dengan cara mempelajari dan mengutip teori-teori dari sejumlah literatur yang berupa buku, jurnal, internet serta karya tulis lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
- b. Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung ke lokasi guna untuk mendapatkan informasi dan terkait data yang ada hubungannya dengan penulisan ini.

3.5 Operasionalisasi Variabel Penelitian

Dalam rangka memudahkan dalam pengukuran suatu penelitian maka konsep dan defenisi tersebut perlu dibuat pemahaman yang sama agar lebih operasional dalam pengukurannya. Hal ini untuk menghindari dalam kesalahan pengukuran yang digunakan agar hasilnya dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah dan dapat diterapkan dilapangan.

1. Indeks Pembangunan Manusia (Y)

Indeks Pmbangunan Manusia merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara yang mencakup tiga hal mendasar, yaitu indeks harapan hidup, indeks pendidikan, dan indeks pendapatan. Data IPM yang digunakan di peroleh dari BPS Provinsi Riau. Satuan pengukuran IPM adalah indeks.

2. Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (X_1)

Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan merupakan alokasi dana APBN/APBD yang dikeluarkan pemerintah sektor pendidikan. Data pengeluaran pemerintah sektor pendidikan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data realisasi pemerintah sektor pendidikan Kabupaten Kampar periode tahun 2010-2017. Data pengeluaran pemerintah sektor pendidikan yang digunakan di peroleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kampar. Satuan pengukuran data pengeluaran pemerintah sektor pendidikan yang digunakan adalah ratusan milyar rupiah.

3. Pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan (X_2)

Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan merupakan alokasi dana APBN/APBD yang dikeluarkan pemerintah sektor kesehatan. Data pengeluaran pemerintah sektor kesehatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data realisasi pemerintah sektor kesehatan Kabupaten Kampar periode tahun 2010-2017. Data pengeluaran pemerintah sektor kesehatan yang digunakan di peroleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kampar. Satuan pengukuran data pengeluaran pemerintah sektor kesehatan yang digunakan adalah ratusan milyar rupiah.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif dan analisa kuantitatif. Analisa deskriptif yaitu cara menguraikan dan menganalisa data dengan menggambarkan sejumlah peristiwa dan objek penelitian yang ditabulasikan kedalam tabel-tabel serta mengaitkan teori yang ada hubungannya dengan permasalahan tersebut. Di samping itu, menggunakan metode yang bersifat analisa kuantitatif yaitu analisa dengan mengukur kuatnya hubungan linier antara variabel bebas dan variabel terikat.

Variabel bebas (independent variabel) yang disimbolkan dengan variabel X yaitu Pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan Pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan, serta variabel terikat (dependent variabel) yaitu Indeks Pembangunan Manusia (Y).

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan sektor kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Kampar periode 2008-2017, karena memiliki dua variabel maka analisa ini menggunakan regresi berganda dengan data time series sepuluh tahun. Dan untuk mengolah data digunakan alat bantu komputer dengan menggunakan program Eviews 9. Adapun persamaan regresi berganda yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

Y = (IPM) Indeks Pembangunan Manusia (%)

X₁ = Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (Rupiah)

X_2 = Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (Rupiah)

$b_1 - b_2$ = Koefisien regresi untuk masing-masing variabel X

b_0 = Konstanta

e = Error

Selanjutnya untuk memperkuat variasi data, maka model tersebut di ubah dalam bentuk semi logaritma sebagai berikut:

$$Y = b_0 + b_1 LX_1 + b_2 LX_2 + e$$

Selain itu untuk mengetahui analisis pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan sektor kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia penulis juga menggunakan model berbagai uji untuk pengujian hipotesis yaitu sebagai berikut:

1. Uji Kesesuaian (Uji Hipotesis)

a. Koefisien Determinasi (R-Square)

Koefisien Determinasi yang dinotasikan R^2 , merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi karna dapat menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang diestimasi. Nilai koefisien determinasi mencerminkan seberapa besar variabel terikat dalam mempengaruhi variabel bebasnya. Kisaran nilai koefisien determinasi R^2 adalah $0 \leq R^2 \leq 1$. Model dikatakan semakin baik apabila nilai R^2 mendekati 1 atau 100% (Gurjati,2003).

b. Uji t (Uji Parsial)

Uji ini pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independent secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependent. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan significance level 0,05 ($\alpha = 5\%$). H_0 di terima jika nilai probabilitas $> (\alpha=0,05)$, artinya variabel bebas tidak ada pengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Dan H_a diterima jika nilai probabilitas $< (\alpha=0,05)$, artinya variabel mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Maka dapat dilihat dari nilai probabilitas dibandingkan dengan $\alpha=0,05$.

c. Uji F (Simultan)

Untuk melihat apakah variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat maka digunakan uji statistik F, dengan kriteria keputusan:

- Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka terdapat hubungan atau pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat.
- Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka tidak terdapat hubungan atau pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikatnya.

2. Uji Asumsi Klasik

Pengujian hipotesis ini dapat dilakukan dengan cara menggunakan metode analisis regresi berganda yang digunakan untuk mengukur pengaruh variabel independent (X) terhadap variabel dependent (Y).

a. Uji Normalitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah kedua variabel dalam model regresi mempunyai distribusi normal atau tidak. Menurut Widarjono (2013:49)

ada 2 metode untuk mengetahui apakah model regresi tersebut normal atau tidak, antara lain sebagai berikut.

a) Histogram Residual, ciri utamanya yaitu bentuk grafik distribusi normal ialah menyerupai lonceng, apabila tidak berbentuk lonceng maka model regresi tersebut mempunyai distribusi tidak normal.

b) Uji Jarque-Bera, model regresi yang mempunyai distribusi normal nilai JB nya harus diatas nilai Chi-Square.

b. Uji Multikolinearitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Jika variabel bebas saling berkorelasi maka variabel-variabel ini tidak ortogonal.

c) Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik seharusnya teradi heteroskedastisitas. Salah satu metode yang digunakan untuk pengujian heroskedastisitas ialah metode white. Metode white mengembangkan sebuah metode yang tidak memerlukan asumsi tentang adanya normalitas pada variabel gangguan (Widarjono, 2013:125). Cara mendeteksi apakah model regresi tersebut terjadi heteroskedastisitas atau tidak bisa dilihat dari nilai *chi-square* dengan ketentuan sebagai berikut.

a) Nilai *chi-Square* < nilai kritis, maka tida terjadi heteroskedastisitas

b) Nilai chi-square > nilai kritis, maka terjadi heteriskedastisitas



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

4.1 Letak dan Keadaan Geografis Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar termasuk kabupaten yang terluas dan padat akan penduduknya di Provinsi Riau. Secara astronomis, Kabupaten Kampar terletak antara $01^{\circ}00'40''$ Lintang Utara dan $00^{\circ}27'00''$ Lintang Selatan dan antara $100^{\circ}28'30''$ - $101^{\circ}14'30''$ Bujur Timur dan dilalui oleh garis ekuator atau garis khatulistiwa yang terletak pada garis lintang 00. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Kampar memiliki luas wilayah sebesar $11.289,28 \text{ km}^2$ dengan batas-batas: Utara - Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak; Selatan - Kabupaten Kuantan Singingi; Barat - Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Sumatra Barat; Timur - Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak. Berdasarkan surat keputusan Gubernur Militer Sumatra Tengah Nomor: 10/GM/STE/49 tanggal 9 November 1949, Kabupaten Kampar merupakan salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Riau terdiri dari Kawedanaan Pelalawan, Pasir Pangarayan, Bangkinang dan Pekanbaru Luar Kota dengan ibu kota Pekanbaru. Berdasarkan UU No.12 tahun 1956 ibu kota Kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang dan baru terlaksana tanggal 6 juni 1967.

Dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah di tingkat Kabupaten dan Kota sesuai dengan UU Nomor 53 tahun 1999, bermunculan daerah Kabupaten/Kota yang baru di Provinsi Riau yang bersal dari pemekaran beberapa

kabupaten, termasuk di Kabupaten Kampar yang dimekarkan menjadi 3 wilayah Pemerintahan, yaitu: 1) Kabupaten Kampar terdiri dari 8 kecaatan meliputi 153 Desa dan 8 Kelurahan dengan ibukota Bangkinang, 2) Kabupaten Pelalawan trdiri dari 4 Kecamatan meliputi 81 Desa dan 4 Kelurahan dengan Ibu Kota Pangkalan Kerinci, 3) Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 7 Kecamatan meliputi 89 Desa dan 6 Kelurahan dengan Ibu Kota Pasir Pangarayan.

Tabel 4.1 Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Luas Wilayah di Kabupaten Kampar tahun 2017

No	Kecamatan	Banyak Desa	Luas Wilayah (km ²)
1	Kampar Kiri	19	915,33
2	Kampar Krir Hulu	24	1.301,25
3	Kampar Kiri Hilir	7	759,74
4	Gunung Sahilan	11	597,97
5	Kampar Kiri Tengah	9	330,59
6	XIII Koto Kampar	12	732,40
7	Koto Kampar Hulu	6	674,00
8	Kuok	9	151,41
9	Salo	6	207,83
10	Tapung	25	1.365,97
11	Tapung Hulu	14	1.168,15
12	Tapung Hilir	16	1.013,56
13	Bangkinang Kota	2	177,18
14	Bangkinang	7	253,50
15	Kampar	17	1.36,28
16	Kampar Timur	9	173,08
17	Rumbio Jaya	7	76,92
18	Kampar Utara	8	79,84
19	Tambang	17	371,94
20	Siak Hulu	12	689,80
21	Perhentian Raja	5	111,54

Sumber: Kabupaten Kampar Dalam Angka 2018

4.2 Kondisi Demografi Kabupaten Kampar

Penduduk merupakan sumber penting dalam kegiatan ekonomi dan usaha membangun perekonomian suatu perekonomian. Tingkat perkembangan penduduk secara mutlak diketahui sebagai pedoman dalam perencanaan maupun evaluasi terhadap keberhasilan maupun kegagalan dalam suatu pembangunan. Selain itu penduduk merupakan suatu faktor penting dalam dinamika pembangunan itu sendiri, sekaligus merupakan objek ekonomi yang memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi.

Penduduk adalah sekelompok orang yang tinggal atau menetap dalam sebuah wilayah atau daerah yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling interaksi satu sama lain secara terus menerus. Tentunya dengan berbagai macam ragam suku, budaya, ras, dan tradisi dan agama. Penduduk Kabupaten Kampar terdiri dari berbagai suku dan latar belakang sosial, agama, dan kebudayaan yang beraneka ragam.

Penduduk Kabupaten Kampar berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2017 sebanyak 832.387 jiwa yang terdiri atas 427.065 jiwa penduduk laki-laki dan 405.332 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2016, penduduk Kabupaten Kampar tahun 2017 mengalami pertumbuhan sebesar 0,02 persen dengan masing-masing pertumbuhan penduduk laki-laki sebesar 2,42 persen dan penduduk perempuan sebesar 2,55 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2016 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 105,43.

Tabel 4.2 : Jumlah Penduduk Kabupaten Kampar Menurut Kecamatan dan Laju Pertumbuhan Penduduk 2017

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Ribuan)	Laju Pertumbuhan
----	-----------	--------------------------	------------------

					Penduduk pers Tahun	
		2010	2016	2017	2010-2016	2015-2016
1	-1	-2	-3	-4	-5	-6
2	Kampar Kiri	26.304	30.676	31.353	0,02	0,02
3	Kampar Kiri Hulu	10.541	12.1	12.314	0,02	0,02
4	Kampar Kiri Hilir	10.112	11.702	11.934	0,02	0,02
5	Gunung Sahilan	17.241	20.218	20.697	0,02	0,02
6	Kampar Kiri Tengah	23.677	27.558	28.15	0,02	0,02
7	XIII Koto Tengah	21.242	24.673	25.189	0,02	0,02
8	Koto Kampar Hulu	16.682	19.364	19.742	0,02	0,02
9	Kuok	22.188	25.726	26.251	0,02	0,02
10	Salo	22.844	26.518	27.068	0,02	0,02
11	Tapung	82.883	98.031	100.61	0,02	0,03
12	Tapung Hulu	70.267	84.617	87.202	0,02	0,03
13	Tapung Hilir	52.439	61.603	63.096	0,02	0,02
14	Bangkinang Kota	35.006	40.639	41.482	0,02	0,02
15	Bangkinang	29.151	33.735	34.405	0,02	0,02
16	Kampar	44.632	51.601	52.611	0,02	0,02
17	Kampar Timur	21.424	25.129	25.727	0,02	0,02
18	Rumbio Jaya	15.198	17.54	17.875	0,02	0,02
19	Kampar Utara	15.196	17.609	17.965	0,02	0,02
20	Tambang	53.024	62.64	64.266	0,02	0,03
21	Siak Hulu	86.658	103.09	106.00	0,02	0,03
22	Perhentian Raja	15.47	18.042	18.44	0,02	0,02
23	Kampar	692.17	812.70	832.38	0,02	0,02

Sumber: Kabupaten Kampar Dalam Angka 2018

4.3 Pemerintahan

Awal terbentuknya Kabupaten Kampar sejak tahun 1956 berdasarkan UU NO 12 tahun 1956 dengan ibu kota Bangkinang. Pada awalnya Kabupaten Kampar terdiri dari 19 kecamatan. Sejak di berlakukannya UU NO 53 Tahun 1993 Juncto Surat Keputusan Mentri Dalam Negeri NO 75 Tahun 1999 tanggal 24 Desember 1999, maka Kabupaten Kampar resmi di mekarkan menjadi 3 kabupaten,yaitu Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten

Kampar. Setelah terjadi pemekaran di Kabupaten Kampar maka kecamatan yang yang bermula hanya 19 kecamatan namun sekarang menjadi 21 Kecamatan dan 250 Desa/Kelurahan. Pemekaran tidak hanya terjadi pada tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan saja, tapi juga pada tingkat desa/kelurahan. Dari 250 Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Kampar pada tahun 2017 sebanyak 118 desa berkembang, 73 merupakan desa yang tertinggal, 30 desa merupakan desa sangat tertinggal, 20 desa merupakan desa maju, dan 1 desa merupakan desa mandiri. Desa yang tertinggal ini berada di Kecamatan Kampar Kiri Hulu yaitu sebanyak 9 desa.

Kabupaten Kampar yang beribu kota Bangkinang telah berkembang dengan pesat dengan kemajuan pembangunan. Dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Kampar dapat menjadi harapan terwujudnya setiap permasalahan dan tantangan yang bermunculan sesuai dengan perkembangan jaman, dalam artian dapat mewujudkan dalam bidang sosial, ekonomi, politik dan lainnya dalam masyarakat.

4.4 Pendidikan

Dikatakan berhasil atau tidaknya suatu daerah dipengaruhi oleh tingkat SDM nya (Sumber Daya Manusia) yang dimiliki oleh daerah tersebut. Semakin maju atau semakin tingginya kualitas pendidikan maka akan meningkatkan sumber daya manusia yang dimiliki oleh daerah. Seperti halnya di Kabupaten Kampar tingkat partisipasi pendidikannya cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari angka partisipasi sekolah penduduk usia 7-24 tahun.

Tabel 4.3 : Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur Sekolah dan Partisipasi Sekolah di Kabupaten Kampar 2017

Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Sekolah	Partisipasi Sekolah		
	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Sekolah Lagi
1	2	3	4
Laki-Laki/Male			
7-12	0,82	98,75	0,43
13-15	0,54	92,89	6,56
16-18	0,32	75,27	24,41
19-24	0,41	25,76	73,83
7-24	0,58	72,57	26,85
Perempuan/Female			
7-12	0,83	99,1	0,16
13-15	0,65	96,33	3,02
16-18	0,27	76,13	23,61
19-24	0,68	26,65	72,67
7-24	0,58	72,57	26,85
Laki-laki/Perempuan			
7-12	0,83	98,87	0,30
13-15	0,60	94,62	4,79
16-18	0,30	75,68	24,03
19-24	0,54	26,18	73,28
7-24	0,58	72,57	26,85

Sumber: Kabupaten Kampar Dalam Angka 2017

Maka dapat di perhatikan pada tabel diatas tingkat partisipasi sekolah penduduk masih baik, partisipasi sekolah untuk usia 7-12 (usia ideal menduduki bangku SD) pada laki-laki dan pada perempuan sebesar 98,87 dan partisipasi sekolah untuk usia 13-15 (usia ideal menduduki bangku SLTP) pada laki-laki dan perempuan mencapai 94,62 sedangkan untuk usia 16-18 (usia ideal menduduki bangku SMA) pada laki-laki dan perempuan mencapai 75,68 dan untuk usia 19-

24 (usia ideal menduduki bangku perkuliahan) ini sangat rendah sebesar 26,18.

Untuk total angka partisipasi sekolah penduduk usia 7-24 mencapai 72,57.

Kualitas pendidikan dapat dilihat dari angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Berdasarkan IPM Metode Baru, angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah dapat dilihat dalam tabel 4.4 : Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kampar 2010-2017.

Tabel 4.4 : Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kampar 2010-2017

Tahun	Harapan Lama Sekolah
2010	11,65
2011	11,93
2012	12,22
2013	12,51
2014	12,72
2015	12,86
2016	12,87
2017	13,20

Sumber : BPS Provinsi Riau Tahun 2018

Kemudian dibawah ini akan disajikan dalam Tabel 4.5 jumlah angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kampar periode tahun 2010-2017

Tabel 4.5 : Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Kampar 2010-2017

Tahun	Rata-Rata Lama Sekolah
2010	8,08
2011	8,56
2012	8,59
2013	8,62
2014	8,84
2015	8,85
2016	9,09

Sumber : BPS Provinsi Riau Tahun 2018

Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kampar pada tahun 2017 mencapai 13,20 diharapkan anak-anak pada usia tertentu merasakan sekolah selama 12 tahun sebagaimana program yang dicanangkan pemerintah wajib belajar 12 tahun. Namun diharapkan tidak hanya belajar sampai 12 tahun saja namun dapat melanjutkan belajar hingga jenjang perkuliahan. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kampar tahun 2017 sebesar 9,09 yang berarti bahwa secara rata-rata penduduk Kabupaten Kampar sudah bersekolah selama 12 tahun.

4.5 Kesehatan

Pembangunan pelayanan dan kualitas kesehatan harus terus ditingkatkan pada perbaikan gizi, upaya penurunan angka kematian bayi dan ibu melahirkan serta upaya jangka waktu usia hidup. Namun perlu diperhatikan dalam permasalahan kesehatan dan perlu ditingkatkan yaitu kebiasaan masyarakat hidup sehat dan bersih, membuang limbah sampah sehingga akan tercipta lingkungan hidup sehat.

Sarana dan prasarana dari tahun ke tahun senantiasa ditingkatkan untuk menunjang kehidupan yang lebih sehat dan sejahtera bagi masyarakat. Di Kabupaten Kampar pada tahun 2017 tercatat ada 6 rumah sakit, puskesmas perawatan 8 dan puskesmas non perawatan 23, puskesmas pembantu 181, dan puskesmas keliling 28 serta 356 posyandu yang tersebar di setiap kecamatan. Tenaga kesehatan yang ada juga semakin lengkap. tercatat ada 66 dokter umum, 36 dokter gigi.

4.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat dilihat dengan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia yang mencerminkan pencapaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Dengan melihat perkembangan kemajuan IPM setiap tahunnya, kemajuan yang dicapai Kabupaten Kampar perlahan meningkat. Angka IPM Kabupaten Kampar pada tahun 2017 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu 72,19 dari sebelumnya tahun 2016 sebesar 71,39.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan di Kabupaten Kampar

5.1.1 Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan di Kabupaten Kampar

Nilai pengeluaran pemerintah sektor pendidikan di Kabupaten Kampar selama tahun 2008-2017 tidak hanya di anggarkan dalam bentuk beasiswa ataupun bantuan dalam pendidikan, bantuan bagi orang yang kurang mampu, namun pengeluaran di sektor pendidikan juga termasuk fisik dan non fisik. Investasi dalam hal pendidikan mutlak dibutuhkan maka pemerintah harus dapat membangun suatu sarana dan sistem pendidikan yang baik. Alokasi anggaran pengeluaran pemerintah terhadap pendidikan merupakan wujud nyata dari investasi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Pengeluaran pembangunan pada sektor pembangunan dapat dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur pendidikan dan penyelenggaraan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat secara merata. Anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN merupakan wujud realisasi pemerintah untuk meningkatkan pendidikan (Wahid, 2012).

Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan akan berpengaruh terhadap perkembangan di sektor pendidikan yaitu dengan meningkatnya jumlah murid yang mampu menyelesaikan sekolahnya sampai tingkat yang lebih tinggi. Adapun nilai pengeluaran pemerintah sektor pendidikan di Kabupaten Kampar, sebagai berikut:

Tabel 5.1.1 : Nilai Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan di Kabupaten Kampar tahun 2008-2017

Tahun	Sektor Pendidikan (Rp Ribu)
2008	419.078.131
2009	471.558.944
2010	515.812.148
2011	671.468.180
2012	687.178.416
2013	807.501.687
2014	936.160.809
2015	943.150.209
2016	932.664.626
2017	837.593.260

Sumber : Data Olahan 2019

Berdasarkan Tabel 5.1 dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan di Kabupaten Kampar mengalami naik turun. Pengeluaran pemerintah yang tertinggi terdapat pada tahun 2015 dengan total pengeluaran sebesar 943.150.209 ribu rupiah sedangkan pengeluaran pemerintah terendah terdapat pada tahun 2008 dengan total pengeluaran sebesar 419.078.131 ribu rupiah.

Dalam hal pendidikan ini merupakan investasi yang mutlak dibutuhkan maka pemerintah harus dapat membangun suatu sarana dan sistem pendidikan yang baik. Alokasi anggaran pengeluaran pemerintah terhadap pendidikan merupakan wujud nyata dari investasi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan akan berpengaruh terhadap perkembangan di sektor pendidikan yaitu dengan meningkatnya jumlah murid yang mampu menyelesaikan sekolahnya sampai ketingkat yang lebih tinggi.

5.1.2 Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan di Kabupaten Kampar

Pengeluaran pemerintah yang tercermin dalam APBD memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi alokasi dan fungsi retribusi yang salah satu fungsinya yaitu fungsi alokasi untuk memenuhi permintaan masyarakat terhadap tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana layanan publik yang tidak dapat dipenuhi oleh swasta. Pendanaan terhadap pembangunan fasilitas-fasilitas umum yang akan digunakan oleh masyarakat berhubungan langsung dengan seberapa besar jumlah pengeluaran yang dialokasikan oleh APBD untuk menyediakan fasilitas umum yang diperlukan.

Pada hakikatnya pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak dasar untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan UUD 1945 pasal 28 ayat (1) dan UUD No 23 1992 tentang kesehatan. Prioritas kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan sumber daya manusia.

Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas juga dibutuhkan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Dalam hal ini dibutuhkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendorong peran manusia dalam pembangunan.

Pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan. Sektor kesehatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi

sumber daya manusia, dengan kata lain aspek kesehatan turut mempengaruhi pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan.

Sektor kesehatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sumber daya manusia, dengan kata lain aspek kesehatan turut mempengaruhi pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan. Kekurangan kalori, gizi atau rendahnya derajat kesehatan bagi penduduk akan menghasilkan kualitas manusia yang rendah dengan tingkat mental yang terbelakang (Merang Kahang, 2016: 134)

Tabel 5.1.2 : Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan di Kabupaten Kampar tahun 2008-2017

Tahun	Sektor Kesehatan (Rp Ribu)
2008	69.711.633,66
2009	60.060.868,56
2010	61.867.794,47
2011	75.702.547,06
2012	82.496.068,24
2013	99.722.043,45
2014	141.687.069,5
2015	157.578.753,6
2016	171.546.325,6
2017	187.867.042,4

Sumber : Data Olahan 2019

Berdasarkan Tabel 5.2 dapat dilihat dan disimpulkan bahwa jumlah total pengeluaran pemerintah di Kabupaten Kampar tahun 2008 hingga 2017 di sektor kesehatan di Kabupaten Kampar terus mengalami kenaikan yang cukup baik. Dapat dilihat pada tahun 2008 total pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan sebesar 69.711.633,66 ribu rupiah sedangkan pada tahun 2017 mengalami kenaikan yg cukup pesat yaitu sebesar 187.867.042,4 ribu rupiah.

5.1.3 Analisis Data Pengaruh Pengeluaran Pemerintah sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Hasil analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia, diperoleh hasil sebagai berikut:

Dependent Variable: Y
 Method: Least Squares
 Date: 04/12/19 Time: 11:57
 Sample: 1 10
 Included observations: 10

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOGX1	4616.500	1035.753	4.457143	0.0029
LOGX2	55.51047	710.0744	0.078176	0.9399
C	691700.1	3384.650	204.3639	0.0000
R-squared	0.927690	Mean dependent var	718946.8	
Adjusted R-squared	0.907030	S.D. dependent var	638.9369	
S.E. of regression	194.8183	Akaike info criterion	13.62534	
Sum squared resid	265679.3	Schwarz criterion	13.71611	
Log likelihood	-65.12669	Hannan-Quinn criter.	13.52576	
F-statistic	44.90262	Durbin-Watson stat	1.688018	
Prob(F-statistic)	0.000102			

Dari hasil pengolahan data yang telah dilakukan didapatkan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = 691700,1 + 4616,500 \log X_1 + 55,51047 \log X_2 + e$$

Dari persamaan diatas, maka dapat diketahui pengaruh dari kedua variabel bebas terhadap variabel terikat. Dari kedua variabel bebas tersebut ada yang berpengaruh positif terhadap IPM dan ada yang berpengaruh negatif terhadap IPM di Kabupaten Kampar. Berikut akan dijelaskan tentang pengaruh tersebut secara rinci.

5.1.4 Interpretasi Hasil

a. Uji Kesesuaian (Uji Hipotesis)

1. Koefisien Regresi

Berikut ini hasil persamaan diatas, yaitu pengeluaran pemerintah sektor Pendidikan, pengeluaran pemerintah sektor Kesehatan, berpengaruh terhadap Indek Pembangunan Manusia di Kabupaten Kampar dengan analisis regresi sebagai berikut:

- a. Konstanta b_0 sebesar 691700,1 artinya jika pengeluaran pemerintah Sektor Pendidikan dan pengeluaran pemerintah Sektor Kesehatan sama dengan 0 maka besarnya Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kampar sebesar 691700,1%
- b. Nilai koefisien b_1 sebesar 4616,500 dan berdasarkan uji t (parsial) berarti pengeluaran pemerintah sektor pendidikan di Kabupaten Kampar berpengaruh terhadap IPM di Kabupaten Kampar. Pengaruh tersebut artinya jika terjadi peningkatan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan di kabupaten Kampar sebesar 1% maka akan meningkatkan IPM di Kabupaten Kampar yaitu sebesar 4616,500%.
- c. Nilai koefisien b_2 sebesar 55,51047 dan berdasarkan uji t berarti variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan di Kabupaten Kampar tidak berpengaruh secara signifikan terhadap IPM di Kabupaten Kampar..

2. Koefisien Determinasi Berganda (R^2)

Koefisien Determinasi Berganda (R^2) berfungsi untuk menyelidiki seberapa besar pengaruh variabel bebas (pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan) secara bersama-sama terhadap naik turunnya variabel yang tidak bebas. Sesuai dengan pengolahan data yang dilakukan maka dapat diketahui nilai R^2 yaitu sebesar 0.927690. Hal tersebut berarti bahwa sebesar 92% variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan sudah mewakili untuk menjelaskan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kampar. Sedangkan sisanya 8% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

3. Uji t (Uji Parsial)

Uji t merupakan pengujian terhadap koefisien dari variabel bebas secara parsial. Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara individu (parsial) mempunyai pengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel tidak bebas, dengan ketentuan:

jika $t_{prob} < \alpha$ 0,05 maka H_0 ditolak

Jika $t_{prob} > \alpha$ 0,05 maka H_0 diterima

Berikut ini penjelasan mengenai uji t :

1. Pengujian pengaruh pengeluaran pemerintah sektor Pendidikan ($\log X_1$) terhadap IPM (Y) di Kabupaten Kampar

Berdasarkan hasil estimasi maka diketahui nilai probabilitas pengeluaran pemerintah sektor pendidikan sebesar $0,0029 < 0,05$ maka H_0 ditolak. Hal tersebut berarti secara parsial pengeluaran pemerintah sektor pendidikan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap IPM di Kabupaten Kampar.

2. Pengujian Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor Kesehatan ($\log X_2$) terhadap IPM (Y) di Kabupaten Kampar

Berdasarkan hasil estimasi maka diketahui nilai probabilitas pengeluaran pemerintah sektor kesehatan sebesar $0,9399 > 0,05$ maka H_0 diterima. Hal tersebut berarti secara parsial pengeluaran pemerintah sektor kesehatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap IPM di Kabupaten Kampar. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2008-2017 anggaran pengeluaran pemerintah sektor kesehatan masih relatif kecil dibandingkan dengan alokasi pengeluaran pemerintah sektor pendidikan.

4. Uji F (simultan)

Uji F merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas berpengaruh signifikan atau tidak terhadap IPM di Kabupaten Kampar.

Jika $F_{\text{prob}} < \alpha 0,05$ maka H_0 ditolak

Jika $F_{\text{prob}} > \alpha 0,05$ maka H_0 diterima

Dari hasil estimasi, diketahui bahwa nilai $F_{\text{prob}} 0,000102 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal tersebut berarti bahwa variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap IPM di Kabupaten Kampar.

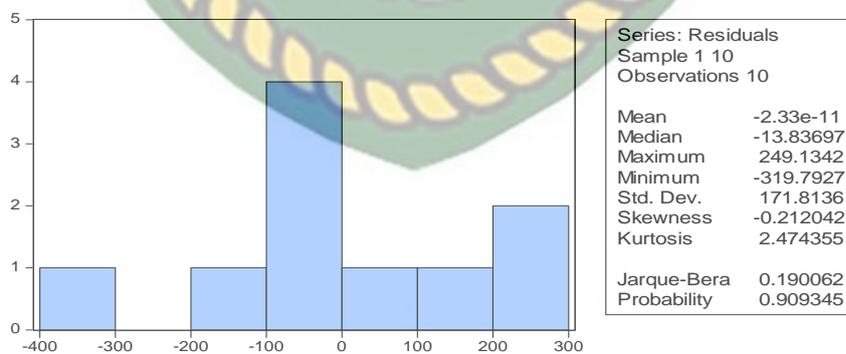
b. Uji Asumsi Klasik

Uji ini dilakukan untuk mengetahui hasil estimasi regresi yang dilakukan benar-benar bebas adanya penyimpangan atas asumsi klasik. Berikut akan dijelaskan hasil analisa pada uji asumsi klasik.

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah variabe bebas dan variabel tidak bebas dalam model regresi mempunyai distribusi normal atau tidak. Untuk mengetahui apakah model regresi tersebut normal atau tidak bisa dilihat dari bentuk histogram residual yang pada umumnya berbentuk lonceng jika mempunyai distribusi normal dan juga melakukan uji Jarque-Bera.

Dari hasil estimasi terlihat bahwa grafik histogram residual model regresi tersebut tidak berbentuk lonceng maka kedua variabel tersebut mempunyai distribusi yang tidak normal. Sedangkan jika dilihat menggunakan uji Jarque-Bera diketahui bahwa nilai JB adalah 0,190062 dan nilai Chis-Square adalah 14,067140. Nilai $JB < \text{nilai Chis-Square}$ yang model regresi tersebut mempunyai nilai distribusi yang tidak normal.



2. Uji Multikolinieritas

Uji ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak hubungan linier antara variabel independen. Adanya hubungan antara variabel dalam satu regresi disebut multikolinieritas. Pengujian ini dilakukan dengan memperhatikan nilai VIF dengan ketentuan jika nilai $VIF < 10$ maka tidak terkena multikolinieritas, dan jika nilai > 10 maka terkena multikolinieritas. Berdasarkan hasil pengolahan data maka diketahui nilai VIF dari variabel independen yaitu nilai $VIF X_1$ adalah 4.384058 dan nilai $VIF X_2$ adalah 4.384058. Dapat dilihat bahwa nilai VIF independen tersebut kecil dari 10 yang artinya kedua variabel tersebut tidak terkena multikolinieritas.

Variance Inflation Factors

Date: 04/12/19 Time: 12:09

Sample: 1 10

Included observations: 10

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
LOGX1	1072784.	9650.443	4.384058
LOGX2	504205.6	3334.187	4.384058
C	11455855	3018.338	NA

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual pengamatan satu ke pengamatan yang lain berbeda. Sedangkan bila terjadi ketidaknyamanan *variance* dari residual pengamat yang satu ke pengamat yang lain maka disebut homokedastisitas. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara

mendeteksi apakah model regresi tersebut terjadi hereskedastisitas atau tidak, bisa dilihat dari nilai Chi-Square (Obs*R-Squared) dan nilai kritis Chi-Square dengan ketentuan jika nilai Chi-Square lebih kecil maka tidak terjadi hereoskedastisitas dan jika nilai Chi-Square lebih besar dari nilai kritis maka terjadi heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil pengolahan data, diketahui bahwa nilai Chi-Square (Obs*R-Squared) adalah sebesar 0.0811 dan nilai kritis Chi-Square sebesar 14,067140. Dapat dilihat bahwa nilai Chi-Square kecil dari nilai kritis Chi-Square artinya model tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas.

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	0.115634	Prob. F(2,7)	0.8925
Obs*R-squared	0.319816	Prob. Chi-Square(2)	0.8522
Scaled explained SS	0.115523	Prob. Chi-Square(2)	0.9439

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 04/12/19 Time: 12:10

Sample: 1 10

Included observations: 10

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-188095.0	659076.0	-0.285392	0.7836
LOGX1	21035.90	201687.0	0.104300	0.9199
LOGX2	18331.10	138269.2	0.132575	0.8983

R-squared	0.031982	Mean dependent var	26567.93
Adjusted R-squared	-0.244595	S.D. dependent var	34004.59
S.E. of regression	37936.00	Akaike info criterion	24.16851
Sum squared resid	1.01E+10	Schwarz criterion	24.25929
Log likelihood	-117.8426	Hannan-Quinn criter.	24.06893
F-statistic	0.115634	Durbin-Watson stat	3.071903
Prob(F-statistic)	0.892468		

5.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Dari hasil pengolahan data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa, variabel Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y) di Kabupaten Kampar. Hasil penelitian ini mendukung atau sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Merang Kahang (2016), Rahmita Handayani (2015) dan M. Alyuriza Syalkafi (2016). Dimana disebutkan bahwa Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.

Sedangkan dari hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini variabel Kesehatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap IPM (Y) di Kabupaten Kampar. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sigit Wibowo bahwa pengeluaran perubahan pada pengeluaran sektor Kesehatan tidak meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kampar. Dalam realitanya Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kampar, tidak dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah sektor Kesehatan. Hal ini terjadi karena, pada tahun 2008-2017 anggaran pengeluaran pemerintah sektor Kesehatan masih sangat kecil. Anggaran pemerintah untuk sektor Kesehatan masih jauh dibawah setiap tahunnya selama periode pengamatan jika dibandingkan dengan alokasi pengeluaran pemerintah sektor Pendidikan. Hal ini sesuai dengan teori dari Sigit Wibowo, 2016 yang berjudul Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Hasil dari penelitian ini ialah dimana hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif dan signifikan

terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kampar, sedangkan pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kampar. Karena dari penelitian penulis kedua faktor tidak semua berpengaruh, hanya satu faktor yaitu pendidikan (X_1) yang berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y) di Kabupaten Kampar.

Hasil analisis sesuai dengan teori (Wahid, 2012). Menyatakan Investasi dalam hal pendidikan mutlak dibutuhkan maka pemerintah harus dapat membangun suatu sarana dan sistem pendidikan yang baik. Alokasi anggaran pengeluaran pemerintah terhadap pendidikan merupakan wujud nyata dari investasi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat.

Pengeluaran pembangunan pada sektor pembangunan dapat dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur pendidikan dan menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada seluruh penduduk Indonesia secara merata. Anggaran pendidikan sebesar 20% APBN merupakan wujud realisasi pemerintah untuk meningkatkan pendidikan. Pemerintah menempatkan pendidikan sebagai faktor penting dalam menunjang pembangunan nasional. Hal tersebut terlihat dari besarnya pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan. Pemerintah menyediakan anggaran minimal 20% dari APBN untuk bidang pendidikan. Hal tersebut tercantum dalam Undang Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 mengamanatkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pengolahan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya dengan model analisis yang digunakan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y) di Kabupaten Kampar, karena nilai signifikan kurang dari 0,05 yaitu sebesar 0,0029. Hal ini terjadi karena pemerintah Kabupaten Kampar mengalokasikan dana yang cukup besar pada setiap tahunnya di Sektor Pendidikan, sehingga Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kampar terus mengalami peningkatan. Sesuai dari hasil uji regresi yang dilakukan juga, bahwa variabel Pendidikan (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y) di Kabupaten Kampar.
2. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y) di Kabupaten Kampar, dikarenakan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,9399. Dimana setiap terjadi pengeluaran perubahan pada pengeluaran sektor Kesehatan tidak meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (Y) di Kabupaten Kampar. Dalam

realitanya Indeks Pembangunan Manusia (Y) di Kabupaten Kampar, tidak dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah sektor Kesehatan. Hal ini terjadi karena, pada tahun 2008-2017 anggaran pengeluaran pemerintah sektor Kesehatan masih sangat kecil dibandingkan dengan alokasi pengeluaran pemerintah sektor Pendidikan.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian di atas, maka pada bagian ini dikemukakan beberapa saran dan rekomendasi sebagai berikut:

- a) Bagi pemerintah daerah agar lebih menentukan program prioritas dalam peningkatan nilai IPM, tidak harus meningkatkan nilai belanja pendidikan maupun kesehatan secara global karena proporsi biaya tidak langsung seperti belanja pegawai dan pembangunan prasarana fisik maupun non fisik tidak berpengaruh nyata.
- b) Dalam menentukan sebuah kebijakan, pemerintah harus meningkatkan pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan, serta hendaknya diarahkan dan disalurkan sesuai kebutuhan yang diperlukan supaya bisa meningkatkan pembangunan manusianya guna untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Merang Kahang, dkk, 2016, "*Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kutai Timur*". Skripsi. Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman. Indonesia.
- Putra, Adi Dwi, 2015. "*Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung*". FEB Universitas Lampung.
- BPKAD, 2017, *Data APBD Pendidikan dan Kesehatan*. Kabupaten Kampar.
- BPS, 2010-2017, *Indeks Pembangunan Manusia Indonesia*. Provinsi Riau.
- BPS, 2010-2017, *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Dalam Angka*. Kabupaten Kampar.
- UNDP, 1990. *Human Development Report*. Oxford Univesrsity Press. New York.
- Sukirno, Sadono, 2000. *Makro Ekonomi Modern*. Jakarta. PT Raja Drafindo Persada.
- Usmaliadanti, S. 2011. *Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indkes Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa tengah Tahun 2007-2009*.
- BPS. 2004. *Data dan Informasi Kemiskinan*.
- Adi Widodo, dkk 2011 "*Analisi Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di sektor pendidikan dan sektor kesehatan terhadap Pengentasan Kemiskinan melalui Peningkatan Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah*". FEB Universitas Diponegoro Semarang.
- Putera, Adi Dwi, 2015 . "*Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah disektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung*". FEB Universitas Lampung.
- Republik Indoesia, Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang pendidikan.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Maqin, Abdul, 2007. *Indeks Pembangunan Manusia Tinjauan Teoritis Empiris di Jawa Barat*. FE Universitas Pasundan . Sumedang.

BPS. 2007. *Data dan Indeks Pembangunan Manusia*.

UNDP, 1996. *Economic Growth and Human Development*. Oxford University Press. New York.

Handayani, Rahmita, 2015. *Analisis Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau*. Fakultas Ekonomi Universitas Riau. Riau.

Cliff Laisina, dkk, 2015. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan Terhadap PDRB Melalui Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara tahun 2002-2013*. FEB Universitas Sam Ratulangi Manado.

Mangkoesebroto, Guritno, 2008. *Ekonomi Publik*. Edisi 3. BPFE, Yogyakarta.

Dumairy, 1996. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.

Wahid, Bila. A. 2012. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Pertumbuhan Ekonomi*. Makassar.

Lanjouw Petter, dkk. "Poverty Education and Helth in Indonesia : Who Benefits From Public Spending ". World Bank Discussion Paper No 339, Washington.2001.